



**Program
SIAP SIAGA
Australia – Indonesia
Partnership in Disaster
Risk Management
(AIP- DRM)**

**Laporan Pembelajaran
No. 1: Penanganan
COVID-19 di Bali,
Indonesia**



Disusun oleh:
Program SIAP SIAGA

Juli 2020

Publikasi ini didanai oleh Pemerintah Australia melalui Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan. Pendapat yang disampaikan di dalam publikasi ini adalah milik sang penulis sendiri dan tidak harus merupakan pendapat dari Pemerintah Australia.

Daftar Isi

Rangkuman Lokakarya.....	4
Latar Belakang dan Tujuan Lokakarya.....	5
Latar Belakang	5
Tujuan.....	5
Tentang SIAP SIAGA	6
Temuan-Temuan Lokakarya	7
Temuan-Temuan	7
Permasalahan Strategis #1	7
Permasalahan Strategis #2	7
Permasalahan Strategis #3	7
Permasalahan Strategis #4	7
Permasalahan Strategis #5	7
Permasalahan Strategis #6	7
Permasalahan Strategis #7	7
Rekomendasi	8
Rekomendasi yang mendukung Teori Perubahan SIAP SIAGA	8
Rekomendasi yang mendukung Prioritas Aksi SFDRR.....	9
Rekomendasi untuk di dalam mendukung Proses Perencanaan Pemerintah.....	9
Lampiran 1: Daftar Peserta.....	12
Lampiran 2: Metodologi.....	13
Lampiran 3: Agenda Lokakarya	15
Annex 4: Foto-Foto Lokakarya.....	16

Rangkuman Lokakarya

Lokakarya pembelajaran tentang penanganan COVID-19 di Bali dilakukan untuk mengidentifikasi pembelajaran penting dari penanganan tersebut, khususnya praktik-praktik terbaik dan untuk memberikan rekomendasi untuk pengembangan kebijakan di masa mendatang. Selain itu, lokakarya bertujuan untuk menilai koherensi, kejelasan dan komunikasi di dalam sistem penanggulangan bencana, khususnya tentang (1) manajemen data dan informasi, (2) kebijakan, kemitraan, dan koordinasi, dan (3) manajemen logistik.

Lokakarya mengidentifikasi tujuh permasalahan strategis dan rekomendasinya untuk melakukan perbaikan, yaitu (1) strategi komunikasi kebijakan untuk mencapai setiap tingkatan masyarakat / sasaran audiensi, (2) pelaksanaan harian kehidupan 'normal baru', (3) skema, mekanisme, dan operasionalisasi (vertikal dan horizontal) koordinasi dan kemitraan *pentahelix* (pemerintah, organisasi masyarakat, sektor swasta, lembaga akademis, dan media), (4) ketahanan pangan dan/atau kemandirian di tingkat rumah tangga, termasuk tapi tidak terbatas pada strategi untuk mengedukasi masyarakat secara luas tentang bagaimana menjaga sumber pendapatan mereka, (5) insentif dan perlindungan bagi relawan, (6) data dan informasi, dan (7) monitoring pengalokasian bantuan.

Permasalahan strategis dan rekomendasi yang muncul kemudian dinilai berdasarkan (1) teori perubahan SIAP SIAGA, yang berfokus pada koherensi, kejelasan dan komunikasi di dalam sistem penanggulangan bencana, (2) strategi yang direkomendasikan dihadapkan terhadap Komitmen Indonesia berdasarkan Kerangka Kerja Sendai untuk Penanggulangan Risiko Bencana (SFDRR),

Latar Belakang dan Tujuan Lokakarya

Latar Belakang

Sejak dikonfirmasi COVID-19 di Indonesia pada 2 Maret, 2020, serta ditunjuknya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memimpin Gugus Tugas Nasional pada tanggal 13 Maret (Perpres No. 7 Tahun 2020) SIAP SIAGA telah bergeser untuk memberikan dukungan kepada BNPB dan kementerian kunci pemerintah lainnya, serta gugus tugas provinsi di Bali dan NTT, untuk mengelola penanganan COVID-19. Fokus utama dukungan ini adalah memperkuat sistem penanggulangan bencana untuk mengakomodasi penanganan sebuah pandemi.

Provinsi Bali segera menanggapi krisis COVID-19 dan dianggap sebagai salah satu provinsi terkuat di dalam penanganan hal ini di Indonesia. Bali memulai penanganan COVID-19 pada Februari 2020, sebelum adanya konfirmasi kasus di Indonesia, dengan Keputusan Gubernur Nomor 556/666/III/Dispar tentang Penangguhan Penerbangan Ke dan Dari Cina yang dikeluarkan pada tanggal 2 Februari, 2020. Pemerintah Bali melanjutkan upaya cepatnya dengan mengeluarkan Surat Edaran No. 2727 Tahun 2020 Peningkatan Kesadaran tentang Penyebaran Penyakit yang Diakibatkan COVID-19 melalui Gerakan Kebersihan dan Sanitasi, diikuti dengan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Gugus Tugas Provinsi, yang muncul lebih dahulu dibandingkan keputusan Pemerintah Pusat untuk membentuk Gugus Tugas Nasional dan Petunjuk Umum tentang Menghadapi Pandemi COVID-19 untuk Pemerintah Daerah: Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis, dan Pengaturannya yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, dengan dukungan dari SIAP SIAGA, pada tanggal 27 Maret, 2020.

Walau telah melakukan manajemen penanganan yang baik, Pemerintah Bali secara konsisten mengeksplorasi berbagai cara untuk memperkuat manajemen responsnya. Pemerintah mengundi dan mengadaptasi pendekatannya, mengingat ketersediaan serta proses pengalokasian ulang anggarannya yang memungkinkan untuk menangani COVID-19 secara lebih efektif. Pemerintah Bali meningkatkan skala pengujian di pulau dengan menggunakan Rapid Test dan PCR Test, serta juga meningkatkan kapasitas rumah sakit (meningkatkan jumlah rumah sakit rujukan), laboratorium, dan menyediakan peralatan bagi fasilitas kesehatan lainnya di tingkat kecamatan. Strategi adaptif Pemerintah Bali juga dapat dilihat pada pendekatan di dalam mengelola para migran yang kembali, titik masuk pulau, dan penanganan kluster transmisi lokal. Selain dari itu semua, Pemda juga menyambut secara terbuka dukungan dari pemangku kepentingan non pemerintah serta mendukung dibentuknya sebuah forum koordinasi khusus untuk penanganan COVID-19 di Bali. Di dalam operasionalnya, Pemda, melalui gugus tugas dan pusat komando, memobilisasi para relawan dari berbagai organisasi dan latar belakang untuk mendukung upaya-upaya pemerintah, khususnya di dalam upaya pencegahan di tingkat komunitas.

Pada keseluruhan kegiatan ini, Pemerintah Bali, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), telah menyatakan perlunya pihak Provinsi untuk mulai mengembangkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Risiko Bencana. Peraturan ini akan menjadi payung untuk semua perencanaan dan kegiatan terkait penanggulangan risiko bencana dan menjadi referensi bagi BPBD untuk mengembangkan rencana strategisnya. Penanganan COVID-19 yang masih berlangsung dilihat memiliki banyak peluang pembelajaran yang dapat digunakan sebagai referensi untuk pengembangan Peraturan Daerah tersebut. Untuk tujuan tersebut, maka lokakarya pembelajaran yang direncanakan ini setuju untuk mengkaji ulang secara kritis pembelajaran yang didapatkan dari penanganan yang ada, khususnya terkait praktik-praktik terbaik, dan untuk memberikan rekomendasi untuk pengembangan kebijakan di masa depan.

Tujuan

Lokakarya Pembelajaran tentang Penanganan COVID-19 di Bali berfokus pada mengidentifikasi pembelajaran dan rekomendasi dengan menggunakan pendekatan diskusi kelompok terfokus (Lihat Lampiran 2) dalam hal:

1. Manajemen data dan informasi untuk membantu koordinasi antara instansi pemerintah daerah di dalam gugus tugas serta juga koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan para pengambil keputusan untuk perencanaan dan pelaksanaan penanganan bencana
2. Turunan kebijakan, pelaksanaan dan pemantauannya dari tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten / Kota hingga tingkat desa serta para kolaborasi dan kemitraan multi pemangku kepentingan
3. Koordinasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan non pemerintah
4. Manajemen logistik

Rekomendasi dari lokakarya pembelajaran ini akan menjadi referensi untuk pengembangan Kemitraan Berbasis Rencana Penanggulangan Risiko Bencana yang akan digunakan sebagai jembatan menuju Peraturan Daerah yang akan mencakup hal-hal berikut:

1. Manajemen data dan informasi untuk koordinasi, akuntabilitas dan pengambilan keputusan
2. Turunan kebijakan, pelaksanaan dan pemantauannya dari tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten / Kota hingga tingkat desa serta para kolaborasi dan kemitraan multi pemangku kepentingan
3. Koordinasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan non pemerintah
4. Manajemen logistik

Lokakarya dihadiri oleh peserta yang terdiri dari 19 laki-laki dan 13 perempuan dari berbagai latar belakang. Silakan melihat Lampiran 1 untuk melihat daftar peserta.

Tentang SIAP SIAGA

Diluncurkan pada November 2019, SIAP SIAGA didanai oleh Pemerintah Australia, melalui Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) dan dikelola oleh Palladium. Program lima tahun yang bernilai 25 Juta Dolar Australia ini bertujuan untuk memperkuat penanggulangan risiko bencana di Indonesia dan hubungan antara Australia dan Indonesia. Program memiliki fokus domestik untuk meningkatkan kemampuan Indonesia untuk mencegah, mempersiapkan, melakukan respons dan pemulihan terhadap bencana-bencana yang muncul baik secara cepat mau pun perlahan; serta fokus regional untuk memperkuat kerja sama antara Australia dan Indonesia dalam hal permasalahan kemanusiaan regional.

Dengan bekerja di tingkat nasional dan daerah, SIAP SIAGA mendukung prioritas Pemerintah Indonesia terkait Penanggulangan Risiko Bencana yang ada di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2019-2024) serta Rencana Induk Penanggulangan Bencana Indonesia 2015-2045. Selaras dengan komitmen Pemerintah untuk pendekatan *pentahelix*, SIAP SIAGA juga bermitra dengan organisasi masyarakat, akademisi, mitra-mitra pembangunan, dan media untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana.

Temuan-Temuan Lokakarya

Temuan-Temuan

Berikut adalah permasalahan-permasalahan strategis yang perlu diperbaiki berdasarkan hasil identifikasi lokakarya:

Permasalahan Strategis #1

Strategi komunikasi kebijakan untuk mencapai setiap lapisan masyarakat / sasaran audiensi, yang termasuk tapi tidak terbatas pada:

- a. Mengajak para pemimpin opini lokal untuk berpartisipasi secara aktif dan bertanggungjawab di dalam melakukan diseminasi informasi dan edukasi publik;
- b. Menyelaraskan kebijakan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten / kota; dan
- c. Memaksimalkan semua media dengan bahan-bahan yang sederhana dan mudah dipahami, seperti menggunakan bahasa daerah.

Permasalahan Strategis #2

Pelaksanaan kehidupan sehari-hari di dalam normal baru, yang termasuk tapi tidak terbatas pada penyiapan para pelaku pemerintah dan non-pemerintah untuk dapat beradaptasi dan menyesuaikan kapasitas mereka untuk kebutuhan masyarakat di dalam 'normal baru'.

Permasalahan Strategis #3

Skema, mekanisme, dan operasionalisasi (vertikal dan horizontal) koordinasi dan kemitraan *pentahelix* (pemerintah, organisasi masyarakat, sektor swasta, lembaga akademis, dan media), yang termasuk tapi tidak terbatas pada (1) skema insentif (kemitraan umum swasta masyarakat), (2) peningkatan koordinasi di masing-masing tingkatan, khususnya terkait dengan data dan informasi, (3) penyatuan rasionalisasi di dalam menyalurkan bantuan, (4) dukungan keuangan untuk kegiatan operasional lembaga swadaya masyarakat, dan (5) strategi untuk mengoptimalkan kerja sama dan koordinasi antara anggota gugus tugas.

Permasalahan Strategis #4

Ketahanan pangan dan / atau kemandirian di tingkat rumah tangga, termasuk tapi tidak terbatas pada sebuah strategi untuk mengedukasi masyarakat untuk menjaga sumber pendapatan mereka secara independen.

Permasalahan Strategis #5

Insentif dan perlindungan bagi relawan.

Permasalahan Strategis #6

Data dan informasi, yang termasuk tapi tidak terbatas pada (1) pemetaan manajemen logistik satu pintu, (2) sistem pelaporan dan skema penyaluran dan data kesediaan bahan dari Gugus Tugas kabupaten ke tingkat provinsi, termasuk pemeriksaan dan pemantauannya, dan (3) validasi integrasi data dan pembaharuannya secara lebih baik dan lebih cepat.

Permasalahan Strategis #7

Pemantauan alokasi bantuan, termasuk tapi tidak terbatas pada memfasilitasi inspektorat, audit dan penegak hukum terkait sebagai bagian dari pemantauan serta alokasi dan transparansi

anggaran dan operasional.

Rekomendasi

Lokakarya ini merupakan sebuah kesempatan untuk pembelajaran dan memberikan rekomendasi untuk pengembangan kebijakan di masa depan, khususnya pengembangan kebijakan publik. Kebijakan publik dipahami sebagai "... keputusan dan tindakan pemerintah yang dirancang untuk menangani hal yang menjadi permasalahan publik" (Cochran dan Malone¹, 2014). Kembali ke mandat SIAP SIAGA, yaitu untuk menilai koherensi, kejelasan dan komunikasi di dalam sistem penanggulangan bencana secara luas, maka bagian ini akan memberikan (1) analisis terhadap hasil lokakarya itu sendiri, (2) analisis terhadap permasalahan yang ditampilkan di atas terkait dengan Kerangka Kerja Sendai untuk Penanggulangan Risiko Bencana, dan (3) analisis permasalahan strategis terkait rencana-rencana pemerintah. Ketiga analisis ini diharapkan menjadi poin-poin utama pembelajaran dan menjadi latar belakang untuk advokasi bagi penanggulangan bencana yang lebih baik.

Rekomendasi yang mendukung Teori Perubahan SIAP SIAGA

Permasalahan Strategis #1, #2, dan #3 yang disajikan di atas mengindikasikan bahwa penanganan COVID-19 kurang memiliki koherensi dalam hal pengintegrasian lembaga, administrasi, dan organisasi serta pengintegrasian para pelaku tingkatan.

Apa yang perlu disoroti adalah koordinasi antara instansi pemerintah seperti yang diindikasikan dari hasil lokakarya akan masih terus adanya budaya "bekerja sendiri-sendiri" di mana setiap instansi pemerintah cenderung bekerja sendiri. Ini merupakan implikasi dari kenyataan bahwa Gugus Tugas sendiri jarang duduk bersama untuk melakukan perencanaan dan pengalokasian dan / atau berbagi sumber daya secara bersama.

Kejelasan dan komunikasi berjalan senada, dan terdapat lima bidang yang telah diidentifikasi sebagai tidak jelas, yaitu, komunikasi kebijakan, klaim skema pengeluaran (penyaluran) terkait fasilitas karantina bagi pekerja migran dan pasien tanpa gejala, instruksi di tingkat desa dan dusun, distribusi peran antara instansi pemerintah, dan sanksi yang diterapkan. Salah satu bidang tersebut, khususnya komunikasi kebijakan, menjadi sangat penting untuk ditindaklanjuti. Sekali lagi, Permasalahan Strategis #1, #2, dan #3 mengindikasikan kurang jelasnya Penanganan COVID-19 di beberapa bidang.

Dinyatakan di atas bahwa kejelasan terkait erat dengan komunikasi. Komunikasi, dalam konteks ini komunikasi kebijakan publik, yang melibatkan dua komponen, yaitu pengirim dan penerima. Penting untuk dipahami bahwa pesan dari pengirim mungkin akan diterima secara berbeda dari apa yang diinginkan sang pengirimnya. Karena itu, kemungkinan adanya penafsiran harus diantisipasi dan itu merupakan tanggung jawab pihak pengirim memastikan bahwa pesan diterima sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya (Collela,² 2014).

Juga disebutkan di dalam lokakarya bahwa komunikasi kebijakan publik tentang COVID-19 merupakan sebuah tantangan, dan bahwa Permasalahan Strategis #1 secara khusus berbicara tentang permasalahan bahwa komunikasi kebijakan perlu dipahami di semua tingkatan. Selain itu juga, edukasi, yang dibahas di dalam Permasalahan Strategis #4, hendaknya juga dilihat sebagai komunikasi. Karenanya, Permasalahan Strategis #1 hendaknya dapat menjawab Permasalahan Strategis #4.

Di dalam konteks koherensi, kejelasan dan komunikasi, Permasalahan Strategis #1, #2, #3, dan #4 hendaknya diadvokasikan oleh Pemerintah Bali.

¹ Public Policy: Perspective and Choices, 5th Edition, 2014 <https://www.rienner.com/uploads/53aae610dd33a.pdf>.

² Communication: Heart of Organizational Leadership, 2014.

<https://books.google.co.id/books?id=LPMuBQAAQBAJ&pg=PA11&dq=communication+is+defined&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjW266K2MDqAhXSc30KHZUeB7gQ6AEwBXoECAQQAg#v=onepage&q=inherent&f=false>

Rekomendasi yang mendukung Prioritas Aksi SFDRR

Analisis Permasalahan Strategis yang dihadapkan dengan SFDRR didasarkan pada tabel berikut ini dimana permasalahan-permasalahan strategis akan digantikan oleh prioritas aksi SFDRR masing-masing yang terkait untuk melihat pentingnya aksi-aksi tersebut.

Prioritas SFDRR ³	Permasalahan Strategis
Prioritas 1: Memahami Risiko Bencana ⁴	- Permasalahan Strategis #1 - Permasalahan Strategis #2 - Permasalahan Strategis #5
Prioritas 2 ⁵ : Memperkuat Tata Kelola Risiko Bencana untuk Menanggulangi Risiko Bencana	- Permasalahan Strategis #1 - Permasalahan Strategis #3 - Permasalahan Strategis #7
Prioritas 3 ⁶ : Berinvestasi pada Pengurangan Risiko Bencana untuk Ketahanan	- Permasalahan Strategis #3 - Permasalahan Strategis #4
Prioritas 4 ⁷ : Meningkatkan Kesiapsiagaan Bencana demi Penanganan yang Efektif, dan untuk Membangun Lebih Baik pada saat Pemulihan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi	- Permasalahan Strategis #1 - Permasalahan Strategis #3 - Permasalahan Strategis #4 - Permasalahan Strategis #5 - Permasalahan Strategis #6

Sebagai kesimpulan dalam konteks ini, Permasalahan Strategis #1: Strategi komunikasi kebijakan untuk mencapai setiap lapisan masyarakat / sasaran audiensi, Permasalahan Strategis #3: Skema, mekanisme, dan operasionalisasi (vertikal dan horizontal) koordinasi dan kemitraan pentahelix (pemerintah, organisasi masyarakat, sektor swasta, lembaga akademis, dan media), serta Permasalahan Strategis #5: Insentif dan perlindungan bagi relawan hendaknya diprioritaskan di dalam dialog kebijakan dan / atau advokasi kebijakan. Ini hendaknya diikuti dengan advokasi Permasalahan Strategis #2, Permasalahan Strategis #4, dan Permasalahan Strategis #6.

Rekomendasi untuk di dalam mendukung Proses Perencanaan Pemerintah

Agar dapat dukungan kebijakan dari Pemerintah Bali, maka penting untuk melihat kepentingan dan / atau relevansi permasalahan-permasalahan strategis itu terkait rencana pemerintah dan tidak terbatas hanya pada penanggulangan bencana. Ketujuh Permasalahan Strategis yang direkomendasikan itu kemudian dikaji berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Bali untuk 2018-2023 dan Rencana Strategis BPBD Bali 2018-2023. Perlu disebutkan bahwa penanggulangan bencana (dan perubahan iklim) dianggap sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi lima permasalahan strategis lainnya yang disebutkan di dalam RPJMD.

³ Sumber: Sendai Framework for DRR 2015-2030, Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2015.

⁴ Penanggulangan risiko bencana perlu dipahami atas dasar risiko pada semua dimensi kerentanan, kapasitas, paparan terhadap manusia dan benda, karakteristik bahaya dan lingkungan.

⁵ Tata kelola risiko bencana di tingkat nasional, regional dan global penting bagi pengurangan risiko bencana di semua sektor dan memastikan koherensi kerangka kerja hukum, peraturan dan kebijakan publik yang, dengan menentukan peran dan tanggung jawab, akan mendorong dan memberikan insentif kepada sektor publik dan swasta untuk mengambil tindakan dan menangani risiko bencana.

⁶ Investasi publik dan swasta di dalam pencegahan dan pengurangan risiko bencana melalui langkah-langkah struktural dan non struktural adalah penting untuk meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, kesehatan dan budaya seseorang, komunitas, negara dan aset mereka, serta juga lingkungan hidup. Ini dapat menjadi pendorong munculnya inovasi, pertumbuhan penciptaan lapangan kerja. Langkah-langkah tersebut hendaknya efektif dari segi pembiayaan dan berperang penting untuk menyelamatkan nyawa, mencegah dan mengurangi kerugian dan memastikan proses pemulihan dan rehabilitasi yang efektif.

⁷ Pengalaman mengindikasikan bahwa kesiapsiagaan bencana perlu diperkuat untuk mendapatkan penanganan yang lebih efektif dan memastikan kapasitas telah ada untuk pemulihan yang efektif. Bencana juga telah menunjukkan bahwa fase pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi perlu dipersiapkan sebelum bencana terjadi, sebagai sebuah kesempatan untuk «Membangun Kembali Lebih Baik» melalui pengintegrasian langkah-langkah pengurangan risiko bencana. Perempuan dan penyandang disabilitas hendaknya memimpin secara publik dan mempromosikan pendekatan yang berkesetaraan gender dan dapat diakses secara universal selama fase penanganan dan rekonstruksi.

#	Permasalahan Strategis dari Lokakarya Pembelajaran	Relevansi dengan RPJMD Bali 2018-2023	Relevansi dengan Renstra BPBD Bali 2018-2023
1	Strategi komunikasi kebijakan untuk mencapai setiap lapisan masyarakat / sasaran audiensi, termasuk tapi tidak terbatas pada: a. Mengajak para pemimpin opini lokal untuk berpartisipasi secara aktif dan bertanggungjawab di dalam melakukan diseminasi informasi dan edukasi publik b. Menyelaraskan kebijakan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten / kota c. Memaksimalkan semua media dengan bahan-bahan yang sederhana dan mudah dipahami, seperti menggunakan bahasa daerah.	Reformasi Birokrasi dan Layanan Publik 1. Diseminasi informasi program dan kebijakan pemerintah dianggap masih belum optimal 2. Tuntutan untuk dibukanya informasi publik dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi pada layanan publik dan tata kelolanya Permasalahan Strategis: Kapasitas pemerintah daerah dalam hal penanggulangan bencana untuk setiap fase dianggap masih belum optimal Prioritas: Mutu birokrasi dan tata kelola dengan: a. Meningkatkan mutu layanan publik untuk informasi kebijakan b. Meningkatkan kapasitas komunikasi kebijakan c. Meningkatkan akuntabilitas kebijakan	Permasalahan Strategis: Kapasitas pemerintah daerah dalam hal penanggulangan bencana baik pada fase pra bencana, selama bencana dan setelah bencana masih belum optimal khususnya dalam hal kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia dan teknologi di dalam mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan publik
2	Pelaksanaan kehidupan sehari-hari di dalam normal baru	Permasalahan Strategis: Kapasitas pemerintah daerah di dalam penanggulangan bencana pada setiap fasenya di mana pelaksanaan kebijakan Normal Baru yang dapat berkontribusi untuk menciptakan rasa aman dan kenyamanan bagi Krama Bali dianggap masih belum optimal	Permasalahan Strategis: Kapasitas, ketahanan dan kemandirian masyarakat dalam hal penanggulangan bencana masih rendah
3	Skema, mekanisme, dan operasionalisasi (vertikal dan horizontal) koordinasi dan kemitraan <i>pentahelix</i> (pemerintah, organisasi masyarakat, sektor swasta, lembaga akademis, dan media)	Permasalahan Strategis: Kapasitas pemerintah daerah di dalam penanggulangan bencana di setiap fasenya, khususnya yang menyangkut: a. Koordinasi vertikal instansi di daerah serta b. Kerja sama dengan pihak ketiga dianggap masih belum optimal	Arah Kebijakan 1. Memperkuat dan menstabilkan peraturan-peraturan kelembagaan, khususnya di dalam penanganan penanggulangan bencana dengan kapasitas yang memadai di setiap tingkatan pemerintahan, partisipasi dan desentralisasi otoritas dan sumber daya lokal, serta kemitraan di dalam pengurangan risiko bencana, 2. Perencanaan penanggulangan bencana secara terpadu dengan melibatkan semua pihak, serta 3. Meningkatnya kapasitas dan keikutsertaan komunitas dan para pemangku kepentingan lainnya di dalam penanggulangan bencana
4	Ketahanan pangan dan / atau kemandirian di tingkat rumah tangga	Permasalahan Strategis: Kapasitas, ketahanan dan	Permasalahan Strategis: Kerentanan masyarakat terhadap

		kemandirian masyarakat di dalam penanggulangan bencana masih rendah	bencana masih tinggi, khususnya kerentanan ekonomi
5	Insentif dan perlindungan bagi relawan	Tujuan RPJMD 2018-2023: Penyelenggaraan partisipasi masyarakat	Tidak ada Karenanya, permasalahan strategis ini memperkaya bidang manajemen relawan di bawah bagian Pencegahan dan Kesiapsiagaan
6	Dana dan Informasi	Reformasi Birokrasi dan Layanan Publik Tuntutan untuk dibukanya informasi publik dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi pada layanan publik dan tata kelolanya Permasalahan Strategis: Kapasitas pemerintah daerah dalam hal penanggulangan bencana untuk setiap fase dianggap masih belum optimal	Program dan Kegiatan: Memantau kerusakan dan kerugian Indikator kinerja 1. Layanan informasi bencana 2. Penanganan bantuan, tidak hanya pasca bencana, cepat dan tepat pada sasaran sesuai dengan laporan data yang andal dan akurat 3. Penilaian kerusakan / kerugian / bantuan verifikasi
7	Pemantauan alokasi bantuan	Permasalahan Strategis: Kapasitas pemerintah daerah dalam hal penanggulangan bencana untuk setiap fase dan terkait dengan peningkatan mutu layanan publik dan akuntabilitas kebijakan dianggap masih belum optimal	Program dan Kegiatan: 1. Pemantauan, evaluasi, pelaporan dan koordinasi

Di dalam konteks relevansi permasalahan strategis yang direkomendasikan untuk rencana pemerintah, Permasalahan Strategis #1 mencakup lebih banyak poin dibandingkan RPJMD, Permasalahan Strategis #3 dan Permasalahan Strategis #6 mencakup lebih banyak poin dibandingkan Rencana Strategis BPBD.

Belajar dari analisis Permasalahan Strategis yang direkomendasikan lokakarya terhadap (1) koherensi, kejelasan dan komunikasi, dan (2) rencana-rencana pemerintah; maka dapat dikatakan bahwa Permasalahan Strategis #1: Strategi komunikasi kebijakan untuk mencapai setiap lapisan masyarakat / sasaran audiensi Permasalahan Strategis #3: Skema, mekanisme, dan operasionalisasi (vertikal dan horizontal) koordinasi dan kemitraan *pentahelix* (pemerintah, organisasi masyarakat, sektor swasta, lembaga akademis, dan media) hendaknya menjadi prioritas utama penguatan dan / atau perbaikan kebijakan SIAP SIAGA.

Lampiran 1: Daftar Peserta

No	Nama	Gender	Lembaga
1	I Made Rentin	M	BPBD Provinsi Bali
2	Majell Hind	F	Konsulat Jenderal Australia
3	Claire Scott	F	Konsulat Jenderal Australia
4	Lila Kresna	F	Konsulat Jenderal Australia
5	Mia Marina	F	SIAP SIAGA
6	I Gede Sudiarta	M	Kelompok Ahli Gubernur
7	Rai P	M	Dinkes Bali
8	Ni L Pt Budiari	F	Dinsos P3A
9	Arvin Dwiarrahman	M	Yayasan Kopernik
10	Eko Wardani	M	PMI Bali
11	Arya	M	Dinas Pariwisata
12	I Wayan Wetha	M	LOO GT BNPB
13	Amanda Marcella	F	Potato Head
14	Ni Made Anggara Juni Sari	F	BPBD Badung
15	Made Wena	M	Musyawarah Desa Adat (MDA)
16	I B Gd Widayana Putra	M	BPBD Prov Bali
17	I Putu Dedy Rambawan	M	PMI Bali
18	I Wayan Plka Wiadnya	M	BPBD Karangasem
19	Gede Wirakusuma	M	Kominfo
20	I G A Diah Indriyani	F	Dinas Kesehatan Provinsi
21	Inti Triningsih	F	MDMC
22	Fajar Budi Santoso	M	MDMC
23	GNN Oka Pranama	M	Bappeda
24	Gede Adhi	M	BPBD Prov Bali
25	Agung Surya	M	BPBD
26	I Nyoman Widarsana	M	Dinas Perhubungan
27	I Wayan Nuada	M	Kominfo Bali
28	I Wy Gd Eka Saputra	M	BPBD Bali
29	Diyah Perwitosari	F	SIAP SIAGA
30	Anggraeni Puspitasari	F	SIAP SIAGA
31	Dewa Putu AM	M	SIAP SIAGA
32	Melissa Laik	F	SIAP SIAGA

Para peserta dikelompokkan berdasarkan tujuan-tujuan utama yang disebutkan di atas menjadi sebagai berikut:

No	Kelompok	Peserta
1	Data dan Informasi	- Kominfo - Dinas Kesehatan Provinsi - BPBD Kabupaten Karangasem - Kominfo Kota Denpasar - Pusat Data dan Operasional BPBD Provinsi - Kantor Dinas Sosial Provinsi - Musyawarah Desa Adat
2	Kebijakan, Koordinasi dan Kemitraan	- Bagian Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi - Potato Head (Sektor Swasta) - Yayasan Kopernik - Bappeda Provinsi - Dinas Pariwisata Provinsi - Konsulat Jenderal Australia - Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)
3	Logistik	- Petugas Sumber Daya Medis Dinas Kesehatan Provinsi Bali - Kepala Sub-Divisi Logistik dan Peralatan, BPBD Provinsi - Dinas Transportasi Provinsi - Muhammadiyah Disaster Management Centre (MDMC) - Support Bali (Sektor Swasta) - BPBD Kabupaten Badung - BPBD Kota Denpasar - Palang Merah Indonesia Provinsi Bali

Lampiran 2: Metodologi

Metodologi yang digunakan di dalam lokakarya adalah Diskusi Kelompok Terpumpun, yang dipahami sebagai

“... sebuah pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman mendalam terhadap permasalahan-permasalahan sosial. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan data dari kelompok yang terdiri dari individu yang sengaja dipilih dan bukannya berdasarkan sampel yang secara statistik mewakili populasi yang lebih besar” (Nyumba⁸, T. et.al, 2018).

Sementara itu, prinsip yang diterapkan di dalam Diskusi Kelompok Terpumpun adalah

“... instruksi bersifat umum: wawancara kelompok berupa percakapan, tapi percakapan antara anggota kelompok yang dipilih karena mereka memiliki kompetensi naratif terkait dengan sebuah topik yang sedang diteliti. Pertukaran pendapat di dalam kelompok ini dipimpin oleh moderator yang tertarik akan topik tersebut dan yang mengatur agar pembicaraan tidak menjadi bertele-tele, dengan menggunakan sebuah petunjuk wawancara” (Cropley⁹, A.J., 2019).

Karenanya, dapat dikatakan bahwa lokakarya ini menggunakan wawancara dengan sekelompok individu terpilih yang memiliki kompetensi terkait topik utama yang dinilai, yaitu (1) manajemen data dan informasi, (2) kebijakan, koordinasi dan kemitraan, dan (3) manajemen logistik dengan menggunakan sebuah petunjuk wawancara.

Petunjuk Wawancara

Seperti disebutkan di atas bahwa wawancara dengan peserta menggunakan sebuah petunjuk wawancara untuk menilai koherensi, kejelasan dan komunikasi tentang (1) manajemen data dan informasi, (2) kebijakan, koordinasi, dan kemitraan, dan (3) manajemen logistik. Petunjuk wawancara yang disusun mengadopsi “delapan blok bangunan untuk meningkatkan koherensi kebijakan di dalam pelaksanaan SDG” menghasilkan delapan aspek yang akan dinilai, yaitu (1) komitmen, (2) integrasi, (3) perspektif jangka panjang, (4) dampak kebijakan, (5) koordinasi, (6) keterlibatan tingkat regional dan lokal, (7) keterlibatan multi pemangku kepentingan, dan (8) monitoring dan pelaporan, sebagai berikut:

ASPEK	INDIKATOR (-INDIKATOR)
Komitmen	1. Pernyataan tentang komitmen dimasukkan ke dalam kebijakan COVID-19 2. Rencana Aksi untuk penanganan COVID-19 dengan batas waktu tertentu
Integrasi	Terdapat mandat dan mekanisme (perencanaan, anggaran, petunjuk atau regulasi) yang memungkinkan instansi pemerintah untuk menyelaraskan penanggulangan, anggaran dan kebijakan COVID-19 dari sektor-sektor terkait
Perspektif jangka panjang	Sebuah kerangka kerja atau mandat strategis yang memungkinkan didapatkannya dampak jangka panjang dari kebijakan COVID-19

⁸ The Use of Focus Group Discussion Methodology: Insights from Two Decades of Application in Conversation, 2018
<https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/2041-210X.12860#:~:text=Focus%20group%20discussion%20is%20frequently,sample%20of%20a%20broader%20population.>

⁹ Introduction to Qualitative Research Methods, 2019.
https://www.researchgate.net/publication/285471178_Introduction_to_Qualitative_Research_Methods

Dampak kebijakan	Terdapat penilaian sistematis tentang potensi dampak negatif dari kebijakan-kebijakan COVID-19
Koordinasi	Terdapat mekanisme koordinasi lintas sektor yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah berbagi informasi dan mengalokasikan tanggung jawab dan sumber daya
Keterlibatan regional dan lokal	Terdapat sebuah mekanisme koordinasi yang memungkinkan konsultasi, kolaborasi dan penyelarasan secara sistemik di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten / kota
Keterlibatan multi pemangku kepentingan	1. Terdapat sebuah kerangka kerja dan mekanisme hukum yang memungkinkan keterlibatan para pemangku kepentingan (komunitas, lembaga usaha, media, lembaga pendidikan) 2. Sebuah analisis dan kajian tentang keterlibatan pemangku kepentingan
Monitoring dan pelaporan	1. Terdapat ketentuan atau mandat formal untuk memonitor dan melaporkan secara reguler tentang situasi dan / atau perkembangan / kemunduran 2. Laporan pemerintah

Lampiran 3: Agenda Lokakarya

Waktu	Kegiatan	Hasil	Penanggung Jawab
08.30 – 09.00	Pendaftaran peserta		BPBD dan SIAP SIAGA
09.00 – 09.15	Sesi 1: Ucapan selamat datang dan pembukaan dari: - Konsulat Jenderal Australia - Ketua BPBD Provinsi Bali	a. Lokakarya secara resmi dibuka b. Peserta mengetahui tujuan dan poin-poin utama lokakarya	Majell Hind Drs. I Made Rentin AP.M.Si
09.15 – 10.45	Sesi 2: Diskusi pembelajaran dari penanganan darurat COVID-19, dalam hal: 1. Manajemen data dan informasi 2. Turunan kebijakan, pelaksanaan dan monitoring di tingkat nasional, provinsi, kabupaten / kota dan desa, serta kolaborasi multi pemangku kepentingan dan kemitraan serta koordinasi 3. Manajemen logistik	Identifikasi kesenjangan penanganan darurat COVID-19 di Provinsi Bali	Fasilitator: Gede Sudiarta Co-fasilitator: Dewa – Group 1 Diyah – Group 2 Angga– Group 3
10.45 – 11.00	Istirahat		
11.00 – 12.30	Sesi 3: diskusi berlanjut	Identifikasi kesenjangan penanganan darurat COVID-19 di Provinsi Bali	Fasilitator: Gede Sudiarta Co-fasilitator: Dewa – Group 1 Diyah – Group 2 Angga– Group 3
12.30 – 13.30	Istirahat makan siang		
13.30 – 14.30	Paripurna: Presentasi dari masing-masing kelompok @15 menit		Fasilitator: I Gede Sudiarta
14.30-14.45	Istirahat		
14.45-15.45	Paripurna: Rangkuman diskusi dan rekomendasi		I Gede Sudiarta
15.45-16.00	Penutupan oleh Ketua BPBD Provinsi Bali		Drs. I Made Rentin AP.M.Si

Annex 4: Foto-Foto Lokakarya



Pidato pembukaan oleh Kepala BPBD Bali
(Doc.: Mia Marina)



Foto Bersama
(Doc.: Anggraeni Puspitasari)



Grup I: Manajemen Data dan Informasi
(Doc.: Mia Marina)



Grup II: Kebijakan, Kemitraan dan Koordinasi (Doc.: Mia Marina)



Grup III: Manajemen Logistik
(Doc.: Mia Marina)



Presentasi Kelompok
(Doc.: Mia Marina)